

BAB II

Proses Liberalisasi Pada Perdagangan Internasional Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)

Perkembangan perekonomian suatu negara saat ini sangat ditentukan oleh kondisi global, berbagai isu dan kebijakan global sangat menentukan arah dan berdampak bagi seluruh negara di dunia. Proses liberalisasi perdagangan TPT dimulai sejak 1995 bertepatan dengan berdirinya WTO yang bertujuan secara umum menciptakan perdagangan internasional tanpa hambatan dan memperluas akses pasar global. Tingkat perdagangan TPT global dibawah aturan GATT/WTO hingga saat ini dapat dikatakan lebih baik dari sistem sebelumnya, hal tersebut terlihat dari skema perdagangan yang lebih terbuka, transparan, bebas hambatan dan sekaligus memberikan peluang atau spesialisasi terhadap negara-negara berkembang ataupun kurang berkembang untuk mudah berpartisipasi dalam kegiatan perdagangan internasional. Sebelum membahas kondisi industri TPT Indonesia terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana sistem perdagangan TPT internasional dibawah aturan dan prinsip WTO. Pada bab ini penulis akan menjelaskan beberapa poin yang merujuk pada proses liberalisasi yang ditandai dengan perjanjian ATC serta skema perdagangan TPT global saat ini sehingga nantinya dapat mengetahui bagaimana kondisi industri TPT di Indonesia.

2.1 ATC Sebagai Masa Inkubasi Perdagangan TPT Global

Kesepakatan perdagangan TPT global yang tertuang dalam ATC merupakan suatu masa inkubasi selama 10 tahun 1995-2005 yang merujuk pada

proses liberalisasi perdagangan TPT. Pada masa inkubasi tersebut seluruh skema perdagangan TPT dikontrol langsung oleh WTO dengan aturan dan ketentuan yang disepakati bersama. Isi kesepakatan ATC pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa seluruh aturan penjatahan kuota pada masa inkubasi ini diatur sesuai kesepakatan²¹. Dalam kurun waktu 10 tahun tersebut terdapat badan khusus WTO yaitu *Textile Monitoring Body* (TMB) yang ditugaskan untuk mengontrol seluruh kegiatan ATC.

Terdapat skema perdagangan pada masa inkubasi tersebut yaitu pada tahun 1994, 1997 dan 2002 dimana setiap tahunnya terdapat kenaikan jatah kuota secara progresif yang ditujukan untuk pengintegrasian perdagangan TPT global. Pada masa peralihan tersebut seluruh negara yang terikat dalam kesepakatan tersebut diwajibkan mengikuti aturan skema tersebut.

Berakhirnya masa inkubasi ATC pada 2005 menandakan dimulainya liberalisasi perdagangan sektor TPT, akan tetapi masih terdapat kejanggalan di beberapa negara khususnya negara yang kurang berkembang belum sepenuhnya siap dalam persaingan pasar bebas sehingga dalam hal ini WTO memberikan prioritas atau kebijakan lain yaitu perlakuan khusus kepada negara-negara yang kurang berkembang.

2.1.1 Target ATC Pada Perdagangan TPT Global

Kesepakatan ATC dibentuk bertujuan untuk menghapus berbagai hambatan tarif dan non tarif seperti yang diberlakukan oleh sistem sebelumnya yaitu MFA.

²¹ Kemendag RI,

ATC mengajak kepada seluruh negara-negara lainnya untuk ikut berkecimpung dalam perdagangan internasional pada sektor TPT khususnya bagi negara pendatang baru baik negara maju, berkembang maupun kurang berkembang. Harapan dari pada negara-negara anggota bahwa pasca ATC yaitu terciptanya persaingan yang sehat dan luas dengan membuka akses pasar serta mempermudah perizinan dengan menghapus hambatan-hambatan.

Pasca ATC, WTO berhasil merekrut beberapa negara pendatang baru dalam perdagangan TPT global, hal tersebut dapat dibuktikan dengan bertambahnya keanggotaan WTO dari 145 negara pada tahun 1995 menjadi 164 negara saat ini. Pasalnya sasaran utama WTO dalam menciptakan pasar bebas pada sektor TPT adalah negara-negara berkembang agar lebih dapat berinteraksi dengan dunia internasional seperti melalui perdagangan tersebut.

2.2 Faktor-Faktor Terjadinya ATC 1994-2004

Perjanjian ATC merupakan perjanjian lanjutan dari MFA sebagai masa transisi untuk menjembatani proses penghapusan sistem batasan kuota. Perjanjian tersebut merupakan inisiasi bersama dari negara-negara maju dan berkembang pada saat perundingan putaran Uruguay (*Uruguay Rounds*) 1986-1994 untuk menciptakan perdagangan TPT yang lebih bebas (*fully-liberalization*). Hal tersebut mengantakan terjadinya suatu kesepakatan perdagangan TPT yang disebut

Agreement On Textile and Clothing (ATC) 1994-2005 sebagai masa transisi atau persiapan menuju pasar bebas.²²

Secara umum, perjanjian tersebut berangkat dari suatu permasalahan tarif (pajak dan bea masuk) dan non tarif yang dikenakan oleh negara-negara maju (sistem proteksi) sehingga berdampak besar khususnya pada negara-negara berkembang. Hal tersebut terjadi pada masa GATT yang tertuang dalam kesepakatan *multifibre arrangement* MFA 1977-1994 untuk mengatur perdagangan TPT global. Pada sistem MFA tersebut kesepakatan dilakukan secara bilateral untuk mengatur jumlah kuota yang akan ditentukan oleh negara pengimpor saja dan tidak pada negara eksportir. Sistem perdagangan TPT tersebut tentu dapat merugikan negara-negara eksportir karena merasa terbelenggu dalam ikatan kuota yang hanya berhak ditentukan oleh importir. Disamping itu sistem perdagangan TPT dibawah aturan MFA sangat bertentangan dengan prinsip utama GATT yaitu *most favoured nation* dimana semua negara harus memperlakukan negara lain tanpa adanya hak keistimewaan atau dibeda-bedakan yang bersifat diskriminatif.

Terlepas dari sistem tersebut kerugian yang dialami negara-negara eksportir seperti menurunnya harga normal yang diterima pada nilai ekspor mereka sehingga memperburuk keadaan pasar TPT global. Selain itu menurunnya tingkat produksi ekspor dari negara khususnya pada negaa berkembang yang mengakibatkan menurun pula pendapatan devisa negaranya. Kendati tarif yang dikenakan oleh

²² World Trade Organization, *Textile Monitoring Body and The Agreement On Textile And Clothing*, dalam https://www.wto.org/english/tratop_e/texti_e/texintro_e.htm diakses pada (20/11/2017) pukul 16.21

negara maju terhadap negara berkembang berbeda-beda pada suatu komoditi primer dan sekunder akan tetapi dampak yang dirasakan tetap sama yaitu menurunnya pendapatan devisa negara. Terhitung pada tahun 2000 pendapatan devisa negara-negara dunia ketiga umumnya kurang lebih USD 100 milyar.²³ Kondisi perdagangan tersebut merupakan faktor utama yang kemudian mengantarkan pada sebuah kesepakatan putaran Uruguay pada April 1994 di Marrakesh dan mulai berlaku efektif pada awal 1995 segala bentuk hambatan dan batasan kuota secara bertahap dihapuskan. Kesepakatan tersebut diresmikan dan ditandatangani oleh pemerintah dan parlemen dari 124 negara anggota GATT.

Sejak didirikannya organisasi perdagangan internasional (WTO) dengan membawa azas liberalisasi seluruh skema perdagangan global diatur langsung oleh organisasi tunggal tersebut. Proses penyusunan aturan perdagangan TPT oleh WTO tentang perjanjian ATC memerlukan perjuangan keras khususnya dari negara negara berkembang termasuk Indonesia yang tidak ingin lagi dirugikan oleh kebijakan dan aturan global seperti sebelumnya. Pada konferensi tingkat menteri dalam *Uruguay Rounds* para menteri menyepakati bahwa negosiasi perdagangan tekstil dan pakaian jadi harus merujuk pada (integrasi progresif) yang bertujuan untuk liberalisasi perdagangan kedepannya.²⁴

²³ Irma H Hanafi, 2011, *Perdagangan Internasional Pasca Putaran Uruguay dan Dampaknya di Indonesia*, Jurnal Sasi Vol.17 No.4 Hal 3. Dalam https://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_lnk.php?id=292 diakses pada (8/12/2017) pukul 13.34

²⁴ Kemendag, *Persetujuan Tentang Tekstil dan Pakaian Jadi, Komite Anti Dumping*, dalam <http://kadi.kemendag.go.id/attachment/1501120514421456.doc> diakses pada (22/11/2017) pukul 10.09

2.3 Poin-Poin Penting dalam Kesepakatan ATC

Perjanjian ATC dibentuk atas beberapa poin-poin utama sebagai landasan pembentukan perjanjian perdagangan TPT tersebut. Pasalnya perjanjian tersebut merupakan program lanjutan dari GATT 1994 kepada WTO sebagai proses pengintegrasian yang progressif untuk perdagangan produk TPT global selama 10 tahun. Poin pertama yaitu pada masa transisi 10 tahun seluruh produk diintegrasikan secara bertahap merujuk pada volume perdagangan TPT pada tahun 1990 dan cakupan produk yang berlaku pada masa ATC harus mencakup jenis benang, kain, macam macam produk tekstil dan pakaian jadi. Kedua, pada proses pengintegrasian selama 10 tahun, WTO menyediakan fasilitas *safeguard* khusus untuk seluruh negara-negara anggotanya yang terancam atau mengalami kerusakan pada pasar domestik selama masa periode ATC 1994-2004 sehingga ketika era liberalisasi perdagangan TPT 2005 dimulai seluruh kompetitor bersaing dengan kondisi (produksi dan pasar domestik) yang stabil. Ketiga, selama 10 tahun perjanjian tersebut terdapat badan pemantau tekstil atau *textile monitoring body* (TMB) yang ditugaskan WTO untuk mengawasi seluruh negara-negara anggota patuh melaksanakan perjanjian sesuai aturan yang terlampir sehingga diharapkan tidak ada kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan ATC.²⁵ Dalam ketiga unsur kunci perjanjian ATC diatas pada intinya perjanjian ATC dibentuk atas dasar prsoes liberalisasi perdagangan TPT yang progressif dengan memperbesar kuota

²⁵ World Trade Organization, *Textile Monitoring Body and The Agreement On Textile and Clothing*, dalam https://www.wto.org/english/tratop_e/texti_e/texintro_e.htm diakses pada (8/12/2017) pukul 13.38

perdagangan yang ada melalui peningkatan laju pertumbuhan perdagangan TPT global setiap tahunnya selama 10 tahun secara bertahap sehingga pada tahun terakhir 2005 pasar TPT global secara bebas mulai berlaku.

Negara-negara yang menjadi peserta pelaksanaan ATC 1994-2004 yaitu seluruh negara-negara anggota WTO resmi yang saat itu masih berjumlah 145 termasuk Indonesia yang bergabung sejak 1995. Jumlah negara-negara anggota WTO terus bertambah ketika dimulainya liberalisasi perdagangan dunia, tercatat saat ini 164 negara anggota resmi WTO.²⁶ Bertambahnya anggota WTO selama 22 tahun menandakan organisasi tersebut cukup dipercaya dalam membangun kerjasama ekonomi antar negara dalam aspek perdagangan internasional.

2.4 Pengaturan Kuota Eksor dan Impor Pada Masa ATC

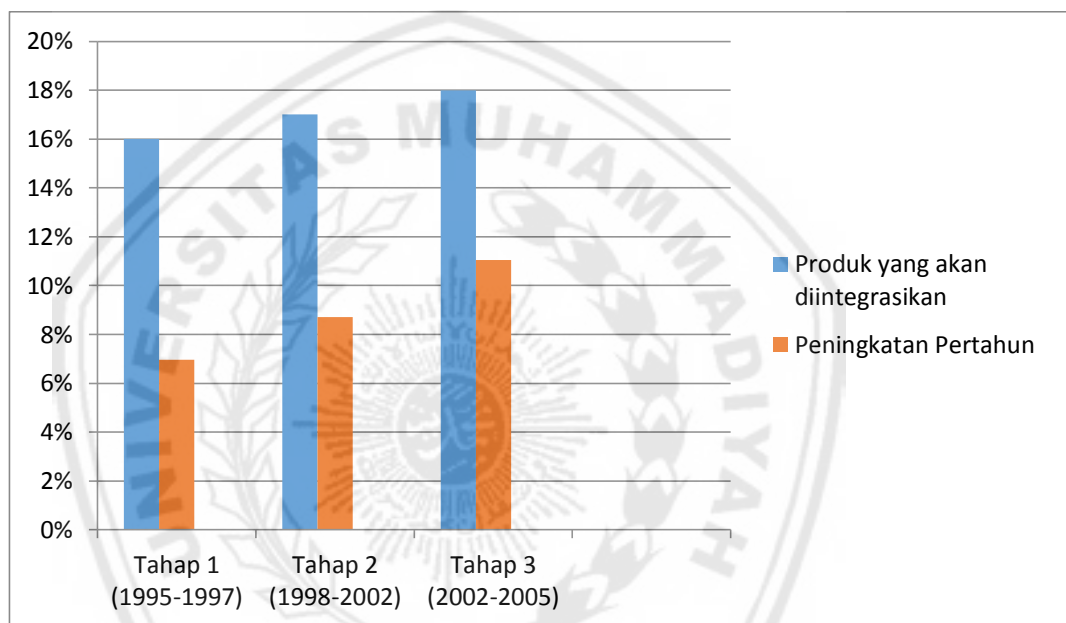
Perjanjian ATC identik dengan pengaturan kuota ekspor dan impor sebagai instrumen utama menuju pasar bebas pada sektor TPT. Pasalnya setelah bertahun-tahun perdagangan TPT selalu diwarnai dengan batasan kuota yang dapat merugikan negara-negara produksi TPT. Pengaturan ini dibuat guna membuka akses pasar dan pesaing baru dalam pasar TPT global secara bertahap yaitu tiga periode selama 10 tahun.

Pengaturan kuota ekspor dan impor tersebut ditujukan untuk menciptakan perdagangan tanpa hambatan baik tarif dan non-tarif. Pada pengaturan kuota

²⁶World Trade Organization, *Members and Observers*, dalam https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm diakses pada (11/11/2017) pukul 11.05 WIB

ekspor, setiap negara diminta untuk mengurangi jatah kuota ekspor per tiga periode dalam 10 tahun untuk diintegrasikan sesuai ketentuan GATT sebagai jatah kuota bagi pesaing-pesaing baru. Berikut adalah tahapan pengintegrasian produk TPT global:

Gambar 2.1 Proses Tahapan pengintegrasian Progressif Pada Masa Transisi 10 Tahun Perjanjian ATC²⁷



Setiap negara pengimpor berhak menentukan sendiri jumlah produk yang akan diintegrasikan pada setiap tahapannya guna menjaga stabilitas pasar domestik sendiri dari ancaman kerusakan pasar. Produk-produk yang

²⁷ World Trade Organization, *Textile Monitoring Body and The Agreement On Textile and Clothing*, dalam https://www.wto.org/english/tratop_e/textile/texintro_e.htm diakses pada (12/11/2017) pukul 11.05

diintegrasikan pada masa ATC harus mencakup benang, kain, macam-macam produk tekstil dan pakaian jadi.

Dalam perjanjian ATC, pasca kuota ekspor dihapuskan maka segala hambatan dalam impor produk pula dihapuskan yang artinya negara-negara anggota WTO dimudahkan dalam proses impor produk TPT seperti menurunkan tarif impor dan mempermudah perizinan.²⁸ Kedua pengaturan ekspor dan impor pada masa ATC tersebut ditujukan untuk mempersiapkan kepada negara-negara anggota WTO menghadapi liberalisasi yakni era baru perdagangan TPT yang lebih bebas dan kompetitif.

2.5 Peran WTO Dalam Pelaksanaan ATC 1994-2004

WTO berdiri atas dasar serangkaian prinsip dan aturan yang disepakati oleh banyak negara dan diratifikasi melalui parlemen. Sejak 1995 WTO berdiri, organisasi tersebut bertujuan untuk membantu mempermudah produsen barang dan jasa serta proses ekspor impor dalam melaksanakan kegiatannya.

Terdapat tiga prinsip utama dalam pembentukan WTO yaitu pertama resiprositas yakni prinsip perlakuan timbal balik dalam suatu hubungan perdagangan antarnegara. Dalam perdagangan TPT global prinsip tersebut sudah menjadi kebudayaan dalam dunia perdagangan dimana hubungan antara negara eksportir dan importir saling memiliki timbal balik (keuntungan) seperti akses

²⁸ Yulia S, 2009, *Saatnya Pemerintah Buat Kebijakan Melindungi Industri TPT*, dalam <http://www.akatiga.org/index.php/publikasi/artikel/item/142-saatnya-pemerintah-buat-kebijakan-melindungi-industri-tpt> pada (29/04/2017) pukul 12.27

pasar, perizinan mudah, tarif rendah dan lain sebagainya. Hal tersebut telah dilakukan oleh beberapa hubungan mitra dagang antar beberapa negara seperti Vietnam dengan AS yang menghapus bea tarif hingga 0% sehingga dapat saling menguntungkan dalam hal perluasan pasar.

Kedua, *most-favoured nation* (MFN) yaitu perlakuan yang sama terhadap suatu negara dan tidak memberikan hak keistimewaan. MFN merupakan landasan utama dalam pembentukan WTO yang mengharuskan seluruh negara memberi perlakuan yang sama terhadap mitra dagangnya tanpa membedakan dengan negara lain. Prinsip MFN tersebut telah menjadi suatu kewajiban dasar bagi seluruh tindakan atau praktek komersial antar negara yang mengharuskan seluruh negara-negara agar menghindari berbagai tindakan yang bersifat diskriminatif baik secara bilateral maupun multilateral.

Ketiga, transparansi yaitu bahwa seluruh negara anggota WTO wajib melakukan kegiatan perdagangannya terhadap mitra dagangnya secara transparansi²⁹. Tindakan tersebut ditujukan kepada WTO maupun negara-negara untuk lebih mudah dalam mengontrol kegiatan-kegiatan yang terjadi pada setiap transaksi sehingga ketika terjadinya kenaikan maupun penurunan dalam suatu perdagangan akan segera dilaporkan dan diambil tindakan oleh WTO seperti tindakan *safeguard*, *anti dumping* perubahan tarif dan non tarif dan lain sebagainya.

²⁹ Irma H Hanafi, 2011, *Perdagangan Internasional Pasca Putaran Uruguay dan Dampaknya di Indonesia*, Jurnal Sasi Vol.17 No.4 Hal 3. Dalam https://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_lnk.php?id=292 diakses pada (8/12/2017) pukul 13.44

Secara umum peran dan fungsi WTO dalam perdagangan internasional adalah untuk mengatur jalannya kegiatan perdagangan internasional menuju arah yang lebih baik (terbuka, bebas dan transparan). Para negara-negara anggota yang tergabung dengan WTO berkomitmen bahwa sistem perdagangan bebas harus terbuka atau transparan dalam prakteknya sehingga membawa kondisi perdagangan global yang sehat. Kondisi pasar domestik akan dipengaruhi oleh sistem perdagangan global yang semakin terbuka dengan membawa aturan dan prinsip yang harus dipatuhi serta terdapat beberapa pengecualian-pengecualian yang bersifat fleksibel agar negara-negara anggota dapat dengan mudah menyesuaikan pada sistem perdagangan bebas. Hal tersebut diinisiasikan oleh WTO untuk menciptakan pembangunan yang berkesinambungan, kesejahteraan yang merata, mengurangi kemiskinan dan membangun perdamaian serta stabilitas pasar agar lebih dapat dikontrol.³⁰

Pelaksanaan ATC dengan ketentuan GATT dibawah kontrol WTO merupakan satu produk dari hasil perundingan putaran Uruguay (*Uruguay Rounds*) yang mengarahkan tentang perdagangan TPT global untuk menghapuskan batasan kuota, proteksi dan subsidi pada sektor pertanian. Diantara berbagai perundingan pada putaran Uruguay, khusus perdagangan sektor TPT dipercepat dalam merealisasikan praktek liberalisasi perdagangan dengan disepakatinya perjanjian

³⁰ Kementrian Luar Negeri RI, *World Trade Organization*, dalam [http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/World-Trade-Organization-\(WTO\).aspx](http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/World-Trade-Organization-(WTO).aspx) diakses pada (13/10/2017) pukul 14.52

ATC selama 10 tahun oleh beberapa negara yang berkepentingan dalam perdagangan TPT global saat itu.

2.5.2 Kebijakan WTO Pasca ATC 2005-2009

Faktanya perjanjian ATC belum sepenuhnya dapat mengintegrasikan perdagangan TPT global. Proses liberalisasi perdagangan TPT membutuhkan jangka waktu yang cukup lama sehingga pasca ATC berakhir masih ada 49% dari seluruh nilai perdagangan TPT global yang belum terintegrasi sehingga hal tersebut menjadi tugas bersama bagi WTO dan negara anggotanya untuk segera merealisasikan liberalisasi perdagangan TPT.

Terdapat beberapa kebijakan tambahan yang diberikan oleh WTO pasca ATC berakhir. Pertama, pada tindakan ekspor impor beberapa negara yang masih terdapat restriksi kuota maka akan diberikan jangka waktu paling lama 4 tahun terhitung pasca ATC dari tahun 2005-2009 untuk segera melapaskan seluruh batasan kuota tersebut. Kedua, pada masalah teknis prosedur perdagangan seperti seperti *packaging*, *marking* dan *labelling* tidak dapat dijadikan sebagai hambatan dalam proses perdagangan TPT kedepannya, hal tersebut dilakukan karena beberapa persyaratan dalam perdagangan global memang cukup ketat sehingga mengharuskan pada setiap produk agar terus terjamin. Ketiga, pada permasalahan *dumping* yaitu menjual barang dipasar luar negeri dengan harga yang lebih rendah dari pada harga penjualan dalam negeri sendiri. *Anti-dumping code* merupakan sebuah tindakan pengamanan yang ditujukan untuk mengatasi impor yang tidak sehat dari negara tertentu dengan produk tertentu yang masuk dalam pasar

domestik. Peninjauan tindakan tersebut dirangkum secara rinci dari sebelum hingga sesudah terjadinya *dumping*. Tindakan tersebut menegaskan bahwa peninjauan atau investigasi pada pasar yang mengalami kerusakan dapat diselesaikan negara eksportir sebelum *initiation of dumping investigation* oleh negara importir maupun badan pemantau tekstil WTO sehingga hal tersebut secara tidak langsung dapat menguntungkan negara eksportir. Ketentuan baru ini melibatkan pemerintah sebagai *interest party*. Tindakan *dumping* merupakan suatu pelanggaran besar yang disengaja dalam praktek perdagangan internasional sehingga dalam hal ini WTO membentuk *Textile Monitoring Body* (TMB) untuk mengawasi praktek perdagangan internasional. Keempat, terdapat tindakan *Countervailing duties* yaitu penambahan subsidi (tindakan imbalan) yang dilarang atau melanggar kesepakatan karena dapat merugikan beberapa pihak yang terkait. Tindakan *Countervailing duties* diawasi oleh pihak yang terkait dalam kesepakatan dan juga WTO dengan TMB nya, hal tersebut merupakan pelanggaran dalam praktek perdagangan internasional. Saat ini tindakan pengamanan *dumping* dan subsidi lebih berpihak kepada negara-negara berkembang (*special treatment for development country*) yang GDP per kapitanya dibawah US\$ 1.000 dapat dibebaskan jika jumlah impor yang disubsidi ke negara lain dibawah 4% dari total impor negara tersebut. Kelima, *Trade Related Property Rights* yaitu perdagangan terkait hak milik, penyelewengan terkait hak milik sering kali terjadi sehingga berujung pada sebuah sengketa di berbagai negara. WTO bersama negara anggotanya menetapkan standar minimum perlindungan yang sebanding dengan negara-negara maju saat ini yaitu dengan masa peralihan 5 tahun bagi negara berkembang dan 10 tahun bagi negara yang

kurang berkembang untuk segera menyelesaikan permasalahan terkait penetapan hak milik tersebut. Hal yang kerap kali terjadi pada sektor TPT yaitu *design textile* dimana banyak dari negara-negara maju yang memproduksi batik yang seharusnya dapat dituntut karena hal tersebut dapat merugikan negara produksi batik negara lain.³¹

Kelima kebijakan WTO pasca ATC tersebut diperlakukan karena melihat dari banyak negara yang memang belum siap untuk melaksanakan liberalisasi perdagangan. Pada intinya dalam liberalisasi perdagangan, WTO lebih memprioritaskan kepada negara-negara terutama yang berkembang dan kurang berkembang yang tertulis dalam prinsip WTO yaitu *Special Treatment for Developing Countries* agar dapat berpartisipasi dalam melaksanakan perdagangan yang sehat.

2.6 Model Perdagangan TPT Global Pasca ATC

Pada era perdagangan TPT internasional yang baru yaitu pasca ATC atau di mulainya liberalisasi perdagangan TPT, prinsip dalam perdagangan TPT yang dilakukan oleh banyak negara secara umum bukan lagi dengan kualitas dan kuantitas tetapi lebih ke arah *non-price factor* seperti pelayanan yang baik mulai dari proses pembayaran yang mudah serta pengiriman barang yang tepat waktu sehingga menimbulkan mitra dagang yang saling percaya. Prinsip tersebut awalnya dilakukan oleh negara-negara maju dan saat ini hampir semua negara yang

³¹ Chamroel Djafri, 2003, *Gagasan Seputar Pengembangan Industri dan Perdagangan TPT (Tkestil dan Produk Tekstil)*, Jakarta, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Cidesindo, hal 153

berkecimpung dalam perdagangan bebas telah melaksanakan perdagangan dengan prinsip tersebut. Pelaksanaan prinsip tersebut dilakukan banyak negara dengan tujuan menjaga dan membangun mitra kerja yang baik untuk jangka panjang. Berikut adalah penjelasan beberapa prinsip perdagangan TPT global pasca ATC:

a) *Quick Response*

Prinsip *quick-response* merupakan mutlak harus dilakukan di era perdagangan global saat ini mengingat maraknya produksi TPT oleh banyak negara saat ini sehingga banyak dari negara konsumen yang tidak hanya melihat dari harga yang murah tetapi lebih kepada pelayanan yang cepat. Telekomunikasi merupakan fasilitas utama yang digunakan oleh banyak negara untuk menjalin hubungan bisnis manufaktur tersebut. Tujuan dari pada *quick-response* adalah untuk membangun hubungan kerjasama yang lebih saling percaya antara konsumen dan produsen dengan harapan jangka panjang.

Keadaan tersebut berbeda jauh dengan kondisi perkembangan produksi TPT di Indonesia yang cukup kesulitan dalam melaksanakan prinsip *quick-response* tersebut. *Pertama*, biaya telekomunikasi di Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di dunia sehingga menjadi pertimbangan berat dalam memutuskan suatu kesepakatan pada proses perdagangan. Tercatat pada perusahaan raksasa telekomunikasi di Indonesia yaitu PT. Telkom dan Indosat setiap tahunnya dengan nilai profit atau keuntungan 29,6% dan 45,7%. Biaya operasional yang tinggi tentu menjadi beban bagi industri TPT dan para IKM (industri kecil menengah) yang tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan perdagangan dengan negara asing.

Disisi lain, perusahaan nasional yang di bidang jasa perantara barang untuk pelaksanaan ekspor impor TPT belum ada.

b) *Non-Price Factor*

Non-price factor terdiri dari kualitas produk, kecepatan pelayanan, jaminan dan ketepatan waktu dalam pengiriman. Prinsip ini ditujukan untuk membangun kepercayaan lebih terhadap konsumennya sehingga tidak lagi melihat dari harga murah atau mahal tetapi merujuk pada kualitas produk dan pelayanan yang merujuk pada hubungan perdagangan yang baik. Prinsip *non-price factor* merupakan hal yang sudah biasa dilakukan terutama pada negara besar produsen TPT yang sudah mengetahui kelemahan pesaingnya pada negara berkembang. Prinsip *non-price factor* tersebut telah dilakukan banyak negara terutama negara besar industri TPT untuk menawarkan hal-hal yang bersifat *non-price factor* pada *wholesalers* (pedagang grosiran) dan *retailers* (pedagangan eceran) di negaranya sendiri.

c) *Quality*

Prinsip kualitas dalam hal ini tidak hanya mengarah pada produk tetapi perusahaan atau manajemen kendali mutu perusahaan. Suatu produk merupakan senjata utama dalam seluruh perdagangan apapun, akan tetapi pada sektor perdagangan TPT saat ini pasca liberalisasi importir atau buyer tidak lagi melakukan *inspection* terhadap kualitas produk pesanannya karena semua itu sudah terjamin oleh eksportir atau *supplier*. Salah satu syarat utama hubungan perdagangan antar perusahaan produsen TPT dan pembeli luar negeri adalah manajemen kendali mutu perusahaan tersebut dalam membangun hubungan kerjasama yang terpercaya. Dalam menjalani manajemen kendali mutu perusahaan

yang terpercaya, saat ini setiap perusahaan diperlukan sertifikat ISO (*international organization for standarization*) sehingga membentuk produk dan produktifitas perusahaan yang terpercaya.

d) Flexibility

Prinsip ini identik dengan *schedule shipment* atau jadwal pengiriman. Hal yang marak terjadi ketika *mass production* atau produksi massal secara berturut-turut selalu mengalami kendala dalam menentukan selera produk yang diinginkan pada pembeli sehingga dalam hal ini pesanan tidak lagi langsung dikirim dalam satu *shipment* melainkan beberapa *short-shipment*. Setelah pesanan pertama dikirim, pesanan berikutnya akan ditanyakan lebih rinci mengenai variasi produk seperti warna, size, motif dan lain lain sehingga pengiriman benar-benar sesuai dengan pesanan. Saat ini *mass production* sudah hampir ditinggalkan oleh banyak negara industri maju TPT karena hal tersebut hanya bertujuan untuk mendapatkan harga yang lebih murah dan jumlah yang banyak (grosiran) dalam satu pengiriman. Era globalisasi saat ini *mass production* telah digantikan dengan *mass customization* yang lebih memprioritaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.

e) Pembayaran

Sistem pembayaran yang umum dilakukan dalam hal perdagangan internasional saat ini yaitu *after delivery* dimana importir atau buyer akan meninggalkan eksportir atau supplier setelah barang telah sampai dan uang telah dikirim. Saat ini pembayaran tidak lagi langsung menggunakan uang tetapi menggunakan sistem FOB (*free on board*), *after L/C (letter credit)* dan *on arrival*.³²

³² Ibid, hal 141-142

2.7 Perkembangan Perdagangan TPT Global Pasca ATC

Perdagangan multilateral dimaksudkan untuk menjadikan pasar global yang lebih terbuka dan bebas. Sistem perdagangan antar negara tersebut berjalan sesuai pada prinsip dan aturan-aturan yang telah disepakati bersama oleh WTO dan negara-negara anggotanya. Terbukanya akses pasar dan berkurangnya hambatan-hambatan ekspor impor telah merubah iklim perdagangan global terutama meningkatnya volume ekspor salah satunya pada sektor TPT.

Perkembangan perdagangan TPT sudah dapat terlihat ketika awal diberlakukannya ATC pada tahun 1994 terhitung meningkat 15%, dan pada tahun 1996 meningkat 1%. Pertumbuhan tersebut mayoritas dialami oleh negara-negara berkembang atau pesaing baru dan bukan negara-negara berkembang yang disekitar negara maju seperti UE dan AS.³³ Pada tahun 2006 bertepatan satu tahun setelah berakhirnya ATC, konsumsi produk tekstil di dunia mencapai 65,2 Kg perkapita dan pada 2008 berkembang hingga 66,6 Kg perkapita, pada tahun 2010 dengan jumlah penduduk mencapai 6,8 miliar jiwa konsumsi produk tekstil meningkat hingga 68Kg perkapita.³⁴ Pertumbuhan tersebut terjadi akibat peningkatan permintaan produk TPT oleh AS, Uni Eropa dan Jepang yang mana ketiga negara tersebut memang merupakan target utama pasar TPT global. Keberhasilan

³³ Ibid, hal 98

³⁴Emirna M, 2007, *Mencermati Kinerja Tekstil Indonesia Antara Potensi dan Peluang*, Economic Review No.209 hal 8. dalam <http://digilib.itb.ac.id/files/disk1/626/jbptitbpp-gdl-erminamira-31285-1-tekstil.pdf> (18/05/2017) Pukul 10.38

pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari aturan dan prinsip yang diterapkan dan dipatuhi bersama oleh WTO dan seluruh pelaku bisnis TPT di dunia ini.

Selain pertumbuhan nilai dan volume perdagangan TPT global pada awal liberalisasi, perubahan iklim perdagangan juga sangat terasa dengan munculnya hal-hal baru seperti blok-blok perdagangan. Kesuksesan persaingan saat ini lebih ditentukan dari seberapa luas akses pasarnya. Disisi lain *non-price factor* juga menjadi hal penting dalam keberhasilan perdagangan TPT seperti kualitas produk, fleksibilitas dalam prosedur pengiriman dan *financial system* yang tepat sesuai kesepakatan. Ketiga hal tersebut dapat menjamin hubungan dagang yang baik dan saling menguntungkan kedepannya. Hampir seluruh negara-negara yang bersaing dalam perdagangan TPT global saat ini memperhatikan beberapa faktor dan *trend* baru tersebut sebagai jurus untuk bersaing di pasar TPT dunia.

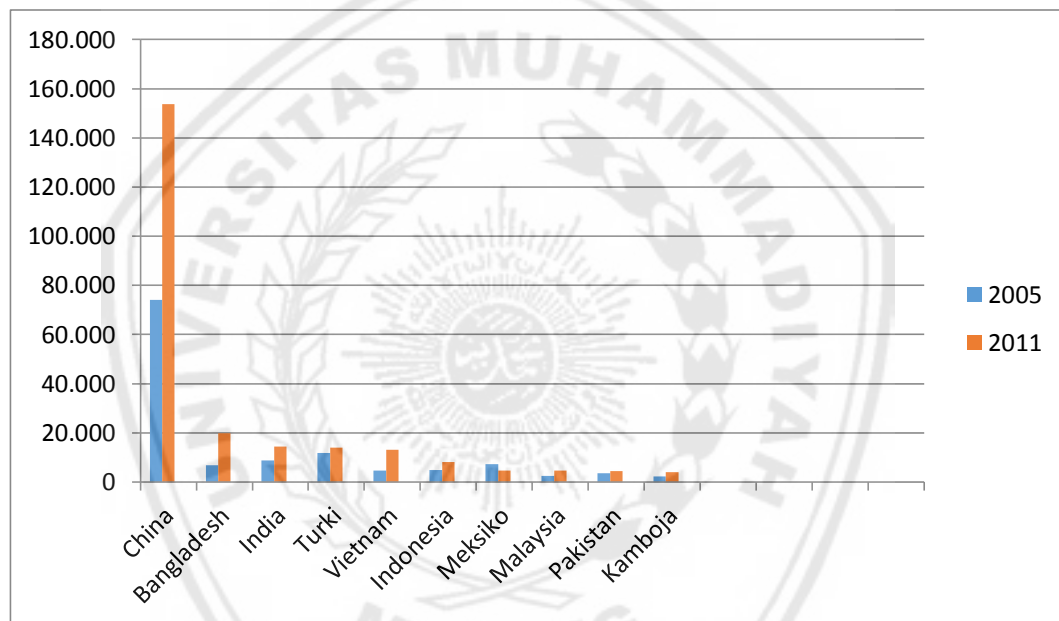
2.7.1 Dinamika Negara Eksportir dalam Perdagangan TPT Global Pasca ATC 2005

Perjanjian ATC telah mengubah dinamika perdagangan TPT dunia secara drastis yang lebih terbuka dan luas. Tingkat persaingan yang tinggi serta akses pasar yang terus bertambah membuat banyak negara produsen mengalami naik turun dalam arus perkembangannya. Hal tersebut merupakan definisi dari praktek perdagangan internasional dimana semua negara berhak menjadi aktor dalam praktek ekonomi internasional.

Pasca pembebasan kuota 2005, dinamika perdagangan TPT global mengalami peningkatan yang cukup signifikan terutama pada total ekspor pakaian

jadi antara tahun 2005-2011. Tercatat pada tahun 2011 ekspor pakaian jadi mencapai US\$ 412 milyar dan terdapat 10 negara berkembang (*top ten developing countries*) yang berhasil menggerakkan dinamika pasar TPT global dengan menyumbang total ekspor tersebut sebanyak 58% dengan di dominasi oleh produk Cina sebesar 37% dari total ekspor tersebut.

Gambar 2.2 Perkembangan Pemasok Pada Negara-Negara Eksportir Dan Dinamika Pasar Pakaian Jadi Dunia Pasca ATC³⁵



Dampak global dari pada liberalisasi perdagangan TPT yaitu naik turunnya arus perkembangan ekspor TPT setiap negara produsen di dunia. Persaingan yang lebih terbuka dan akses pasar yang lebih luas telah mengubah iklim perdagangan

³⁵ World Trade Organization, Ide-Jetro, OECD, 2013, *Aid For Trade and Value Chains In Textile and Apparel*, dalam https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/global_review13prog_e/textiles_and_apparel_28june.pdf hal.13 diakses pada (06/11/2017) pukul 11.46

TPT di dunia. Perbedaan strategi perdagangan TPT setiap negara menciptakan tingkat kompetisi yang semakin bersaing. Berikut adalah perkembangan jumlah ekspor tekstil dan produk tekstil negara-negara di dunia pada tahun 2012:

Tabel 2.1 15 Negara Eksportir Tekstil dan Produk Tekstil di Dunia Tahun 2012³⁶

Peringkat	Negara	Tekstil %	Negara	Produk tekstil %
1	Cina	33,4 %	Cina	37,8 %
2	Uni Eropa	32,1 %	Uni Eropa	32,6 %
3	India	5,3 %	Bangladesh	4,7 %
4	AS	4,7 %	Turki	3,4 %
5	Korea	4,2 %	India	3,3 %
6	Turki	3,9 %	Vietnam	3,3 %
7	Taiwan	3,6 %	Indonesia	1,8 %
8	Pakistan	3 %	AS	1,3 %
9	Jepang	2,7 %	Mexico	1,1 %
10	Indonesia	1,6 %	Malaysia	1,1 %
11	Vietnam	1,4 %	Pakistan	1 %
12	Thailand	1,2 %	Thailand	1 %
13	Mexico	0,8 %	Kamboja	1 %

³⁶ International Trade Statistic WTO, 2013, dalam Yunita D,P, 2014, *Dayasaing dan Determinan Aliran Perdagangan Tekstil dan Produk Tekstil Intra ASEAN 7 dan China*, Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi, Institut Pertanian Bogor, hal.2, dalam <http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/70136/1/H14ydp.pdf> diakses pada (06/11/2017) pukul 11.52

14	Arab Saudi	0,8 %	Srilanka	0,9 %
15	Lainnya	1,3 %	Lainnya	5,7 %
	Jumlah	100 %	Jumlah	100 %

Tujuh tahun pasca berakhirnya ATC tepatnya pada tahun 2012 terlihat perubahan presentase peringkat ekspor TPT dunia terutama pada negara-negara berkembang yang semakin maju dalam perdagangan baik sektor tekstil maupun produk tekstil seperti Vietnam, Pakistan, Thailand, Indonesia, Malaysia, Kamboja dan Srilanka.

2.7.2 Dinamika Negara Importir dalam Perdagangan TPT Global Pasca ATC 2005

Pada umumnya pasar tujuan ekspor utama TPT di dunia tidak mengalami banyak perubahan dimana sejak perdagangan TPT di bawah aturan MFA hingga pasca ATC pasar tujuan ekspor tetap sama yaitu AS dan Uni Eropa yang mengkonsumsi lebih dari setengah dari total impor pakaian jadi dunia. Pada tahun 2005-2011, AS bersama Eropa dan Jepang berhasil menyerap pakaian jadi sebanyak 72% dari total impor pakaian jadi di dunia. Hal tersebut terjadi karena memang tingkat konsumsi yang tinggi di negara tersebut disamping memiliki jumlah penduduk yang banyak. Adapun perubahan impor pakaian jadi dunia yang terjadi dalam kurun waktu 2005-2011 yaitu meningkat jadi 54%.

Tabel 2.2 Neagara-negara Utama Tujuan Ekspor Pakaian Jadi Tahun 2005-2011 (Juta USD)³⁷

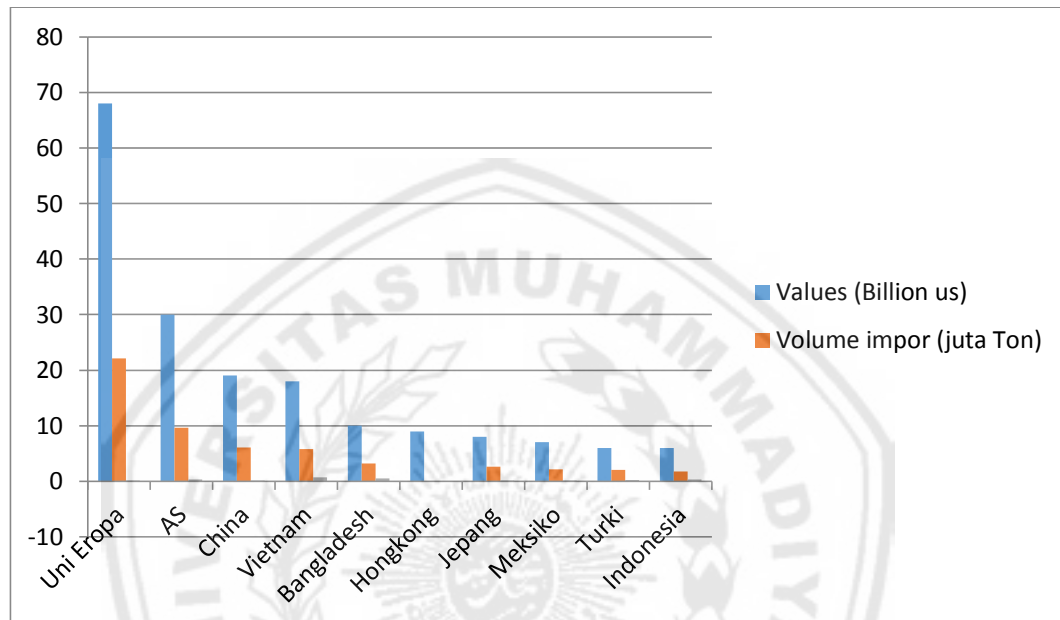
Importer	2005	2011	% Change 2005-2011	% Of Tottal Import 2011
Uni Eropa	131,496	189,048	43%	44%
USA	80,070	88,587	11%	21%
Jepang	22,540	32,934	46%	8%
Hongkong, Taipei	18,436	17,247	-6%	4%
Kanada	5,975	9,531	60%	2%
Federasi Rusia	930	7,566	713%	2%
Swiss	4,450	6,138	38%	1%
Korea	2,913	6,110	109%	1%
Australia	3,119	5,839	87%	1%
Cina	1,628	4,012	146%	1%
Total	279,021	431,136	54%	100%

Pada sektor perdagangan tekstil tahun 2015, Eropa menempati urutan pertama disusul oleh AS dan China. Ketiga negara tersebut merupakan importir tekstil terbesar di dunia karena memang faktor jumlah penduduk yang tinggi dan

³⁷ World Trade Organization, Ide-Jetro, OECD, 2013, *Aid For Trade and Value Chains in Textiles and Apparel*, Hal 14, dalam https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/at_e/global_review13prog_e/textiles_and_apparel_28june.pdf diakses pada (8/12/2017) pukul 10.17

juga terdapat banyak perusahaan-perusahaan pakaian ternama di dunia di negara tersebut.

Gambar 2.3 Negara-Negara Utama Tujuan Ekspor Tekstil di Dunia Tahun 2015 (Billion USD, Juta Ton)³⁸



Amerika Serikat, Cina dan beberapa negara Uni Eropa menjadi konsumen TPT dunia yang paling tinggi, disamping populasi masyarakatnya yang tinggi juga menjadi pusat fashion dunia ditandai dengan banyaknya perusahaan-perusahaan fashion sehingga membutuhkan impor bahan baku yang tinggi untuk diolah. Disisi lain, Indonesia selain sebagai salah satu produsen TPT terbesar juga menjadi sasaran impor bagi negara-negara lain khususnya dari Cina dan beberapa negara

³⁸ World Trade Organization, *Statistical Tables, Top 10 Exporters and Importers of Textiles, 2015*, dalam https://www.wto.org/english/res_e/statistics_e/wts2016_e/wts16_chap9_e.htm diakses pada (8/12/2017)

Asia khususnya yang mana pasca berakhirnya ATC tingkat impor TPT Indonesia terus mengalami peningkatan dan dapat mengancam industri TPT nasional.

